

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Agus Santoso, 2012, “Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum”, Kencana Predana Media Grup, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dkk., “Pokok-Pokok Hukum Perpajakan”, MediaPressindo, Yogyakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2005, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kencana, Jakarta.
- Kesit Bambang Prakosa, Hukum Pajak, EKONISA, Yogyakarta 2006.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad Rusjdi, 2007, PPh Pajak Penghasilan, Indeks, Klaten.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal, SIGn, Makassar.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Rimsky Judisseno, “Pajak dan Perpajakan - Indonesia”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Rochmat Soemitro dan Dewi Kurnia Sugiharti, 2004, “Asas dan Dasar Perpajakan

1: Edisi Revisi”, Refika Aditama, Bandung.

Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

Sutrisno Hadi, 1986, Metodologi Research I, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta.

Soemitro et al., Asas dan Dasar Perpajakan, PT Refika Aditama, Bandung 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima, 2020, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Jakarta.

Urip Santoso, 2007, “Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah”, Prenada, Jakarta.

Widi Widodo dan Dedy Djefris, 2008, “Tax Payer’s Rights, Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak”, Alfabeta, Bandung.

## **B. Artikel Jurnal**

Adrianto Dwi Nugroho, “*The Application of Simplicity Concept of Taxation on Final Income Tax Regime in Indonesia*”, Mimbar Hukum Volume 26, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014;

Adrianto Dwi Nugroho, “*Anti Avoidance Rules di Indonesia Pasca Amandemen UU Pajak Penghasilan*”, Mimbar Hukum Volume 21, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009;

Dahlia Hasan, “Pelaksanaan *Tax Compliance* Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta”, *Mimbar Hukum* Volume 2, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2008;

Dewi Wuryandani, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya”, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis: Vol.XII, No. 15/I/Puslit/Agustus*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2020.

### **C. Hasil Penelitian**

AISYAH, Novi Siti, 2018, Pemungutan Pajak Rokok dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat Terkait dengan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum dan Asas Keadilan, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Saraswati, 2017, Pengenaan PPh Pasal 21 terhadap Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan Sekaligus ditinjau dari Prinsip Keadilan, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

OKTARIO, Benny; OKTARINA, Neneng., 2019, *PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS WARIS DAN HIBAH DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA PADANG*, Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, Bukittinggi, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 111-128.

#### **D. Internet**

Administrator, “Informasi APBN 2021”, Infografis,

[https://kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf](https://kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf;);

Administrator, “Kasus COVID-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik”,

<https://Indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>;

Administrator, “Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Yogyakarta-

Bawen”, Berita, <https://bpjt.pu.go.id/berita/penandatanganan-perjanjian-pengusahaan-jalan-tol-yogyakarta-bawen>;

Bidara Pink, Novellius Laoli, “Mengkawatirkan, Faisal Basri sebut penurunan tax ratio Indonesia paling parah”,

<https://nasional.kontan.co.id/news/mengkawatirkan-faisal-basri-sebut-penurunan-tax-ratio-indonesia-paling-parah>.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994

tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua Tentang

Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau

Bangunan Beserta Perubahannya.